



ANALISIS BUDAYA PATRIARKI DALAM PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN: STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2005 – 2020 DI KOTA DEPOK

Diza Putri Astuti¹, Muhammad Ariel Azfar Hadi², Sarah Finka Simangunsong³

^{1,2,3} Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta

dizaputrias@gmail.com, arielhadi3@gmail.com, sarahfsimangunsong@gmail.com

How to Cite

Astuti, DP, Hadi, MAA, Simangunsong, SF. (2023). Analisis Budaya Patriarki dalam Partisipasi Politik Perempuan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005-2020 di Kota Depok. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 6(2), 126-150 <https://doi.org/10.33541/ji.v3i1.1902>

Abstract

Patriarchal culture creates gender stereotypes, limited access to political networks, and a social stigma for women who want to be involved in political activities. The gender gap is also evident in political representation where women hold a smaller percentage of political positions than men. The city of Depok, as a buffer zone for the capital city, is still thick with this culture, as evidenced by the minimal participation of women in regional elections from year to year. This study will analyze the obstacles to women's political participation in Indonesia caused by patriarchal culture. The case study used is the 2005-2020 Pilkada in Depok City. This research is a qualitative - explanatory research using observation and literature studies to find a deeper understanding of the problems being faced. This study uses three main theories, namely the theory of patriarchy, political participation, and gender stereotypes. From the data that has been analyzed, the main cause of the low political participation of women in the Pilkada in Depok City from 2005-2020 is the strong patriarchal culture. Several factors cause the patriarchal culture to continue to develop in Depok City, namely gender stereotypes, low political education, double burden, and weak political party support for women during elections. This study recommends policy interventions in efforts to increase the level of education for women such as increasing women's representation in political parties, increasing the level of education for women, and empowering women in various sectors such as entrepreneurship, health, and so on to eliminate patriarchal culture and increase women's political participation in Indonesia.

Keywords: *Patriarchy, Political Participation, Local Elections, Educations, Gender Equality.*

Abstrak

Budaya patriarki menciptakan stereotip gender, akses terbatas ke jaringan politik, dan juga stigma sosial bagi perempuan yang ingin terlibat dalam aktivitas politik. Kesenjangan gender juga terlihat dalam representasi politik, di mana perempuan memegang persentase posisi politik yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Kota Depok sebagai daerah



penyangga ibu kota pun masih kental dengan budaya ini dibuktikan dengan minimnya partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pilkada dari tahun ke tahun. Penelitian ini akan menganalisis hambatan partisipasi politik perempuan di Indonesia yang disebabkan oleh budaya patriarki. Studi kasus yang digunakan adalah pilkada tahun 2005-2020 di Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif - eksplanatif dengan menggunakan observasi dan studi literatur untuk menemukan pemahaman lebih mendalam terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Penelitian ini menggunakan tiga teori utama yaitu teori patriarki, partisipasi politik, dan stereotip gender. Dari data yang sudah dianalisis, penyebab utama rendahnya partisipasi politik perempuan pada Pilkada di Kota Depok dari tahun 2005-2020 adalah kuatnya budaya patriarki. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan budaya patriarki terus berkembang di Kota Depok yakni stereotip gender, pendidikan politik yang rendah, beban ganda, dan lemahnya dukungan partai politik kepada perempuan saat pemilu. Penelitian ini merekomendasikan adanya intervensi kebijakan dalam upaya peningkatan taraf pendidikan terhadap perempuan seperti peningkatan representasi perempuan di partai politik, peningkatan taraf pendidikan kepada perempuan, serta pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor seperti wirausaha, kesehatan, dan sebagainya dalam upaya menghapus budaya patriarki dan meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia. **Kata Kunci: Patriarki, Partisipasi Politik, Pilkada, Edukasi, Kesetaraan Gender.**

Masuk: 30 Mei 2023

Review: 15 – 22 Januari 2024

Diterima: 27 Januari 2024

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah merupakan kontestasi demokrasi daerah yang melibatkan partisipasi dari berbagai komponen baik perempuan maupun laki-laki. Dalam hal ini, individu menjalankan hak-hak politiknya untuk turut berpartisipasi secara adil dalam kegiatan pencalonan maupun pemilihan kandidat yang diusung pada periode tertentu. Depok merupakan salah satu kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau wali kota dalam beberapa tahun terakhir. Namun, penyelenggaraan pemilihan wali kota ini masih dijumpai ketimpangan gender yang didominasi oleh laki-laki. Dari perolehan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2005-2020 menunjukkan bahwa hanya terdapat satu perempuan yang maju sebagai wakil dalam pencalonan Wali Kota Depok atau sekitar empat persen partisipasi calon



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi perempuan dalam ruang eksekutif dan kuatnya budaya patriarki di Depok (KPU Depok, 2023). Di sisi lain, perolehan data KPU Depok menunjukkan bahwa pada pemilihan DPRD 2014 dan 2019 telah melibatkan 480 perempuan atau sekitar 39,5% dari total 1214 peserta (KPU Kota Depok, 2023).

Depok dijuluki sebagai 'Kota Religius' yang tidak terlepas dari besarnya kekuasaan partai setempat yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sejak pemilihan wali kota tahun 2005-2020, PKS menjadi partai yang mendominasi di Depok. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan PKS dalam menarik suara dan melakukan pengelolaan sistem perpolitikan di Depok. Adapun basis partai ini bercirikan nilai-nilai yang bertumpu pada aspek religius atau berideologi Islam (ahlus sunnah). Adapun pencalonan wali kota yang diusung oleh PKS dan partai pendukung, memiliki pasangan calon yang identik dengan laki-laki sehingga turut memengaruhi persentase keterwakilan eksekutif perempuan di Depok.

Di sisi lain, Depok merupakan salah satu kota yang termasuk dalam kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sehingga kesadaran masyarakat terkait kehidupan berpolitik terutama partisipasi perempuan sudah sepatutnya tinggi. Namun, dalam ranah eksekutif pemilihan kepala daerah (pilkada) wali kota di Depok angka partisipasi perempuan masih tergolong rendah. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha untuk mengkaji lebih lanjut terkait isu rendahnya partisipasi perempuan dalam ruang eksekutif Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Depok pada periode 2005-2020.

Beberapa masalah yang dapat dirumuskan, antara lain: 1) Dari perolehan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2005-2020 menunjukkan bahwa hanya terdapat satu perempuan yang maju sebagai wakil dalam pencalonan Wali Kota Depok atau sekitar empat persen partisipasi calon perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi perempuan dalam ruang eksekutif dan kuatnya budaya



patriarki di Depok. 2) Adapun pencalonan wali kota yang diusung oleh partai berkuasa dan partai pendukung, mengusung pasangan calon yang identik dengan laki-laki sehingga turut memengaruhi persentase keterwakilan eksekutif perempuan di Depok. 3) Depok merupakan salah satu kota yang termasuk dalam kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sehingga kesadaran masyarakat terkait kehidupan berpolitik terutama partisipasi perempuan sudah sepatutnya tinggi. Namun, dalam ranah eksekutif Pilkada wali kota di Depok angka partisipasi perempuan masih tergolong rendah.

Dari masalah yang telah dirumuskan, maka terdapat pertanyaan penelitian antara lain: 1) Bagaimana budaya patriarki dalam partisipasi politik perempuan pada pilkada di Kota Depok tahun 2005-2020? 2) Apa faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi politik perempuan pada pilkada di Kota Depok? 3) Apa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan pada pilkada di Kota Depok?

Penelitian ini berkaitan dengan beberapa teori dan konsep yaitu patriarki, partisipasi politik, dan teori stereotip gender. Adapun menurut Bressler, patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang dibentuk untuk menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam sebuah organisasi sosial. Hal ini dapat terlihat dari sosok ayah yang memiliki otoritas terhadap keluarganya. Hal ini secara tersirat menjelaskan bahwa laki-laki memiliki hak istimewa dan menuntut subordinasi perempuan (Bressler, 2007). Lebih jauh, Bressler mengatakan bahwa patriarki merupakan sebuah konsep yang digunakan dalam berbagai ilmu sosial, dalam hal ini lebih ditekankan dalam ilmu antropologi dan feminitas. Patriarki juga dapat dipandang sebagai pembagian kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini laki-laki memiliki lebih banyak keunggulan seperti garis keturunan (patrilineal), partisipasi dalam politik, agama, hubungan sosial, pekerjaan, dan lain sebagainya. Patriarki merupakan penyebab penindasan terhadap perempuan.



Masyarakat dalam sistem ini memandang laki-laki memiliki otoritas lebih dibanding perempuan, sebaliknya perempuan dalam budaya masyarakat patriarki dianggap sebagai sosok lemah dalam banyak aspek kehidupan. Budaya seperti ini yang secara sistematis, turun-menurun membentuk adanya perbedaan perilaku antara laki-laki dan juga perempuan, yang akan berdampak pada status serta otoritas mereka di kalangan masyarakat, hal ini dapat dikatakan sebagai hirarki gender (Faturachman, 2002).

Selanjutnya, partisipasi politik adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan erat dengan aktivitas politik. Partisipasi politik secara umum juga dikenal dalam beberapa kegiatan yang memiliki hubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, seperti kampanye dan lain sebagainya. Miriam Budiardjo, mengungkapkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok orang dalam upaya berpartisipasi aktif dalam kehidupan berpolitik (Budiardjo, 1982). Hal tersebut dapat dilakukan dengan memilih pimpinan negara baik secara langsung atau tidak langsung, mencalonkan atau dicalonkan sebagai pejabat publik, atau mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah melalui lobi dan negosiasi. Michael Rush dan Philip Althoft berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses perumusan kebijakan serta pelaksanaan berjalannya kebijakan tersebut. Selain itu, partisipasi politik juga diartikan sebagai proses ikut serta dalam memilih pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga negara yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan umum termasuk memilih pemimpin termasuk ke dalam partisipasi politik (Damsar, 2017:181). Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik yang dilakukan masyarakat merupakan kegiatan yang bersifat sukarela tanpa paksaan siapapun untuk turut serta dalam berpartisipasi di setiap aktivitas politik.

Serta, Stereotip gender merupakan sebuah persepsi umum dari masyarakat terkait karakteristik yang khas bagi masing-masing gender. Stereotip gender telah



terbentuk sejak dahulu dan dipengaruhi oleh budaya dan norma yang ada di tengah masyarakat. Stereotip gender bahkan telah memengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, misalnya pekerjaan, penampilan, dan internal keluarga. Salah satu contoh stereotip gender yang ada hingga saat ini yakni memandang laki-laki lebih kuat dan mampu berpikir logis—dibandingkan perempuan yang dipandang lemah dan lebih emosional. Stereotip gender juga memiliki dampak negatif yakni bisa memberikan batasan bagi setiap gender. Misalnya adalah stereotip perempuan di ranah publik (contohnya politik), perempuan masih dianggap belum mampu untuk terlibat di dunia politik. Stereotip yang ada inilah yang membuat perempuan melakukan peran domestik dan laki-laki melakukan peran publik. Dari stereotip tersebut yang menjadi penyebab kesadaran politik perempuan rendah (Ridestian, 2020). Stereotip gender dipahami sebagai pelabelan khusus mengenai perilaku dari laki-laki dan perempuan. Stereotip gender bisa menjadi prasangka positif bahkan negatif. Prasangka negatif dalam stereotip gender sering dijadikan sebuah alasan dalam tindakan diskriminatif. Dalam negara demokrasi, terdapat paradigma struktural yang memposisikan kelompok rentan yakni kaum perempuan, penyandang disabilitas, kaum lansia, minoritas, dan kelompok lainnya hanya sebagai objek dalam politik. Namun, sering kali keterlibatannya malah dibatasi. Hal tersebut dalam menyebabkan ketidakadilan dalam negara demokrasi, yang seolah-olah hanya laki-laki saja yang berperan penting dalam bidang politik. Namun kenyataannya diperlukan peran serta dari perempuan juga untuk menjadi pengimbang dalam sebuah pembentukan kebijakan yang lebih representatif (Young, 2002).

Metode

Penelitian mengenai Analisis Budaya Patriarki dalam Partisipasi Politik Perempuan (Studi Kasus Pilkada Tahun 2005-2020 di Kota Depok) merupakan penelitian kualitatif-eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan sebuah penelitian



yang berfokus pada topik dan melihat penyebab dan alasan sesuatu terjadi dalam pembahasan topik tersebut. Metode penelitian ini digunakan untuk menemukan pemahaman lebih mendalam terkait permasalahan yang sedang dihadapi dengan memperhatikan situasi dan fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teori utama yaitu patriarki, partisipasi politik, dan stereotip gender.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Depok dan peneliti akan melakukan observasi dan studi literatur yang diperlukan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari hingga Mei tahun 2023. Data-data yang telah penulis dapatkan akan dianalisis melalui metode induktif, di mana metode ini akan menganalisis sebuah peristiwa yang bersifat khusus dan kemudian fakta tersebut dijadikan sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis telah memenuhi konsep *trustworthiness* (kepercayaan) untuk mengevaluasi berbagai nilai yang terkandung di dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Budaya Patriarki dalam Partisipasi Politik Perempuan pada Pilkada di Kota Depok (Periode 2005, 2010, 2015, dan 2020)

Patriarki merupakan sistem yang mengharuskan perempuan dan anak perempuan untuk mematuhi kepala keluarga laki-laki, serta saudara laki-laki, dengan memenuhi peran sebagai istri dan ibu dan menjaga kehormatan keluarga. Di bawah sistem yang patriarki, laki-laki sebagai kepala keluarga menjalankan kontrolnya terhadap perempuan dan anggota keluarga yang lebih muda, termasuk laki-laki yang lebih muda (Amawi, 2007). Dalam teori feminis, patriarki dibagi menjadi dua dimensi yaitu pribadi (*private*) dan publik (*public*). Hak pribadi (*private*) merupakan hak yang dimiliki oleh perempuan terkait pernikahan, perceraian, mobilitas, dan warisan,



sedangkan hak publik merupakan hak perempuan terkait pendidikan dan kehidupan berpolitik (Benstead, 2021).

Di sisi lain, dari sudut pandang Ilmu Politik terdapat istilah 'partisipasi politik' yang dimaknai sebagai hak warga negara untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan politik sehingga mencapai pemerintahan yang demokratis. Partisipasi politik dapat berupa tindakan baik secara individu, kelompok, daring maupun luring. Dalam mewujudkan nilai demokrasi, warga negara dapat terlibat melalui partisipasi politik yang berupa tindakan dengan tujuan memengaruhi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung seperti proses pemilihan (Schlozman and Brady, 2022).

Adapun baik patriarki maupun partisipasi politik merupakan kedua hal yang saling beririsan, terutama mengenai isu ketimpangan gender. Merebaknya isu patriarki merupakan gambaran keterhambatan terhadap partisipasi politik perempuan dalam mewujudkan hak publik yang dimiliki. Menurut Fredrik Kollo, partisipasi perempuan merupakan akses perempuan ke dunia politik atau perebutan kursi politik yang dianggap sebagai ranah maskulin dan hanya diperuntukkan untuk kaum laki-laki (patriarki) (Kollo, 2017).

Dalam pilkada di Kota Depok dari tahun 2005-2020, tercermin bahwa budaya patriarki masih kental melekat. Data yang diperoleh dari KPU Depok, menyatakan bahwa pemilihan Wali Kota yang dijalankan sebanyak empat kali (2005, 2010, 2015, dan 2020) hanya melibatkan satu perempuan calon di ranah pemilihan eksekutif tersebut. Salah satu calon perempuan yang maju adalah Hj. Afifah Alia, S. T dari PDIP pada pemilihan tahun 2020. Afifah maju sebagai calon Wakil Wali Kota Depok dengan pasangannya yaitu H. Pradi Supriatna dari Partai Gerindra. Namun, keduanya gagal lolos dengan perolehan suara sebesar 332.689 dari lawan yaitu pasangan KH. Dr. Mohammad Idris, MA dan Ir. Imam Budi Hartono sebesar 415.657 suara (KPU Depok, 2020). Hal ini menggambarkan adanya keterhambatan partisipasi politik perempuan



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

di ruang eksekutif Kota Depok, sebab melekatnya budaya patriarki pada pemilihan beberapa periode lalu.

Berikut data pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok (periode pemilihan: 2005, 2010, 2015, dan 2020).

Tabel 1. Data Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Tahun	No	Calon Wali Kota		Calon Wakil Wali Kota		Partai Pengusung
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
2005	1	H. Abdul Wahab Abidin	-	M. Ilham Wijaya	-	Demokrat
	2	Drs. H. Harun Heryana	-	Drs. H. Farkhan AR.	-	PAN PBB PBR PKPB PKPI
	3	Drs. H. Badrul Kamal, MM	-	KH. Syihabuddin Ahmad, BA	-	Golkar PKB
	4	Drs. H. Yus Ruswandi	-	HM. Soetadi Dipowongso, SH	-	PDIP PPP PDS
	5	Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc.	-	Drs. H. Yuyun Wirasaputra	-	PKS
2010	1	Drs. H. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd.	-	Derry Drajat	-	Independen
	2	Drs. H. Yuyun Wirasaputra, MM.	-	Pradi Supriatna	-	Gerindra Hanura PBR PKPB PKNU PMB PKPI PDK PPI



						PPPRN PNIM Sarikat Buruh
	3	Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc.	-	Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad	-	PKS PAN Pelopor PNBK Patriot Republik
	4	Drs. H. Badrul Kamal, MM	-	Ir. H. A. Supriyanto, AT., MM.	-	Demokrat Golkar PDIP PPP PDS PKB PDP Hanura
2015	1	Dimas Oky Nugroho	-	Babai Suhaimi. SE	-	PDIP Golkar PAN PKB Nasdem
	2	KH. Dr. Mohammad Idris, MA	-	Pradi Supriatna	-	PKS Gerindra Demokrat PBB
2020	1	H. Pradi Supriatna	-	-	Hj. Afifah Alia, S. T	Gerindra PDIP Golkar PAN PKB PSI Perindo Nasdem Hanura PBB PKPI Garuda Gelora



	2	KH. Dr. Mohammad Idris, MA	-	Ir. Imam Budi Hartono	-	PKS Demokrat PPP Berkarya
--	---	----------------------------	---	-----------------------	---	------------------------------------

Sumber: (KPU Depok, 2023)

Budaya patriarki di Kota Depok juga tidak terlepas dari dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi pemenang secara berturut pada empat periode pemilihan Wali Kota Depok. Menurut analisis peneliti Charta Politika yaitu Dadang Nurjaman dan Direktur *Indonesia Political Review* (IPR) yaitu Ujang Komarudin, kekuasaan PKS di Depok dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kemampuan menarik simpatisan sehingga menjadi basis yang kuat, serta memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan terhadap sistem perpolitikan dan akar rumput (*grass root*) di Depok. Dalam kemampuan menarik simpatisan, PKS memiliki simpatisan warga Depok yang besar daripada partai lainnya sehingga sulit untuk ditandingi. Adapun kemampuan PKS melakukan pengelolaan sistem perpolitikan di Depok dilihat dari keberadaannya di berbagai institusi seperti pendidikan, perbisnisan, pemerintahan, hingga dalam lingkup akar rumput yaitu kemampuan untuk mengelola kelompok pengajian (Ferdinan, Tsia, and VOI, 2020).

Dari data yang diperoleh KPU Depok (Tabel 1) bahwa baik calon Wali Kota maupun pasangan pendamping Wakil Wali Kota yang diusung oleh PKS selama empat periode selalu identik dengan laki-laki. Sejalan dengan pandangan (Nantri, 2023) bahwa partai politik memiliki peluang untuk mengarahkan partisipasi ataupun representasi politik perempuan. Adapun hubungan antara partisipasi perempuan di politik dengan besarnya dominasi PKS di Depok adalah budaya patriarki PKS yang kuat dalam mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota sehingga dapat menghambat partisipasi politik perempuan di ranah eksekutif Depok.



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

Di sisi lain, dari data KPU Depok pemenuhan partisipasi politik yang terdaftar sebagai calon legislatif (DPRD Depok) tahun 2014 dan 2019 diakumulasikan sebanyak 480 perempuan atau 39,5 persen dari 1.214 total calon (KPU Kota Depok, 2023). Adapun jika dilihat dari ranah Pemilu Legislatif (pileg) DPRD, Depok telah memenuhi kebijakan kuota *affirmative action* yang memiliki target partisipasi perempuan sebesar 30%. Hal ini menjadi bentuk ketimpangan antara partisipasi politik perempuan di ranah legislatif dengan eksekutif yang hanya mencapai besaran empat persen pada Pilkada Wali Kota 2005, 2010, 2015, dan 2020 (KPU Depok, 2023).

Perbedaan presentase capaian Pileg dengan Pilkada Depok tidak terlepas dari hambatan perempuan untuk masuk ke ranah eksekutif. Penelitian yang dilakukan oleh LSI menghasilkan bahwa terdapat beberapa hal yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam Pilkada, antara lain: 1) dominasi politik pada sistem partai yang cenderung memihak kepada kaum laki-laki (patriarkis), seperti penjelasan di atas bahwa Kota Depok didominasi oleh PKS yang selalu mengukung kandidat laki-laki; 2) bentuk subordinasi ekonomi pada Pilkada, dimana pengeluaran anggaran yang lebih tinggi sehingga perempuan yang memiliki potensi, tetapi mengalami keterbatasan modal jadi termarginalkan 3) Pilkada hanya mengukung satu kandidat untuk cakupan (*scope*) wilayah yang besar sehingga memiliki tingkat daya saing yang lebih sengit (LSI 2008:7).

Dalam hal ini, yang menjadi kontras perbedaan antara Pilkada dengan Pileg bagi kaum perempuan adalah *cost* anggaran dan tingkat daya saing kandidat. Pada Pileg DPRD, *cost* anggaran lebih kecil karena terfokus pada satu wilayah daerah pemilihan (dapil) dari kandidat yang diusung, sedangkan pilkada lebih memakan *cost* yang tinggi karena cakupan wilayah yang lebih luas (satu kota) (Marwah and Handoko, 2008). Serta, tingkat daya saing perempuan pada pileg lebih kecil karena hanya memiliki fokus satu dapil dengan kandidat yang diusung lebih banyak dan pemilih lebih sedikit, sedangkan perempuan pada pilkada (wali kota) memiliki



tingkat daya saing yang lebih tinggi karena memiliki fokus satu kota dengan kandidat yang diusung hanya satu dan pemilih lebih banyak (Tabel 2).

Tabel 2. Perbedaan Upaya Partisipasi Perempuan Depok di Ruang Pileg (DPRD) dan Pilkada (Wali Kota)

Indikator	Pemilihan Legislatif (DPRD)	Pemilihan Eksekutif (Wali Kota)
Pembiayaan (<i>cost</i>)	Lebih rendah (Karena hanya fokus satu dapil sehingga <i>cost</i> yang dikeluarkan lebih partikular)	Lebih tinggi (Karena fokus satu kota sehingga <i>cost</i> yang dikeluarkan lebih general)
Daya Saing	Lebih rendah 1. Hanya fokus pada satu dapil 2. Memiliki beberapa calon kandidat untuk satu dapil 3. Pemilih lebih sedikit	Lebih tinggi 1. Fokus pada satu kota 2. Hanya mengusung satu kandidat untuk satu kota 3. Pemilih lebih banyak

Sumber: (Marwah and Handoko, 2008)

Faktor-Faktor Penyebab Masih Berlangsungnya Budaya Patriarki pada Pilkada di Kota Depok

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi masih berlangsungnya budaya patriarki pada Pilkada di Kota Depok yakni stereotip gender, rendahnya pendidikan politik, beban ganda (*double burden*), dan lemahnya dukungan partai politik terhadap perempuan. *Pertama*, stereotip gender merupakan kategori luas yang menggambarkan tentang perilaku suatu gender yakni laki-laki dan perempuan. Stereotip gender juga bisa dipahami sebagai pelabelan khusus terkait perilaku dari laki-laki dan perempuan. Stereotip gender sudah ada sejak dulu, dimana laki-laki yang dianggap sebagai orang yang kuat dan bertugas untuk bekerja di luar rumah seperti memburu, sementara perempuan dianggap lemah dan bekerja di dalam rumah yakni bertugas menjaga anak, dan memasak hasil buruan dari laki-laki. Seiring



berjalannya waktu, mulai terjadi perubahan dari konsep stereotip gender. Perempuan dan laki-laki sama-sama bisa bekerja di luar rumah dan mencari nafkah. Walaupun sudah mengalami perubahan konsep, stereotip gender bisa menjadi prasangka positif dan negatif bahkan sering dijadikan sebuah alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif.

Dalam konteks demokrasi, Young berpendapat bahwa paradigma struktural menempatkan kelompok rentan misalnya kaum perempuan, disabilitas, lansia, minoritas, dan lainnya sebagai objek politik, tetapi keterlibatannya sering kali dibatasi. Adapun empat faktor dalam demokrasi yang mampu membuat terhambatnya partisipasi dan melahirkan ketidakadilan yakni eksklusivitas, dominasi/penindasan, ketidaksetaraan struktural, dan politik persaman (Young, 2002). Dengan adanya stereotip gender ini menjadi faktor masih berlangsungnya budaya patriarki pada Pilkada di Kota Depok. Pemerintah Kota Depok sebenarnya sudah memberikan kesempatan yang sama baik bagi laki-laki dan juga perempuan, tetapi budaya patriarki yang terbangun berupa stereotip inilah yang menyebabkan adanya perbedaan perlakuan kepada perempuan. Data menunjukkan bahwa perempuan pada jabatan struktural lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Perempuan pada jabatan struktural sebesar 37 persen tahun 2019, sebesar 37 persen pada tahun 2020, dan sebesar 38 persen pada tahun 2021. Sementara jumlahnya sangat jauh dengan perempuan dengan posisi fungsional yakni sebesar 71 persen pada tahun 2019, sebesar 74 persen pada tahun 2020, dan 74 persen pada tahun 2021 (Rahmawati, Widianingsih, and Karlina, 2023). Dari data tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa ada pekerjaan yang lebih layak dikerjakan laki-laki sementara perempuan tidak dan juga sebaliknya. Sama halnya dengan pilkada yang ada di Kota Depok, perempuan yang maju baru satu orang saja sejak tahun 2005-2020.

Kedua, rendahnya pendidikan politik merupakan salah satu faktor yang memengaruhi terus berlangsungnya budaya patriarki di Kota Depok. Karena budaya



patriarki tersebut menganggap bahwa perempuan tidak perlu terlibat dalam ranah politik karena rendahnya pengetahuan terkait politik. Dengan adanya pendidikan politik maka dapat meningkatkan kesadaran politik dan tentunya memberikan keterampilan yang diperlukan dalam aktivitas politik. Pendidikan politik juga dapat mengurangi adanya ketimpangan gender, sehingga dengan pendidikan yang memadai dapat memperkuat partisipasi politik perempuan. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat akses pendidikan politik bagi perempuan dan terus mendukung perempuan untuk masuk ke dalam ranah politik. Pendidikan politik penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan demokratis, oleh karena itu pendidikan yang inklusif dan bermutu harus diberikan kepada laki-laki dan juga perempuan. Pendidikan politik harus bisa mengatasi hambatan sosial dan stereotip yang seringkali menghalangi perempuan untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki. Selain itu, dengan pendidikan juga bisa memberi ruang aman untuk perempuan agar bisa berkembang tanpa mengkhawatirkan adanya tindakan diskriminasi (Nussbaum, 2000). Sama halnya seperti yang terjadi di Kota Depok, perempuan yang mencalonkan diri baru satu orang saja pada pilkada tahun 2005 hingga 2020. Artinya pendidikan politik belum digencarkan bagi perempuan untuk terlibat langsung dalam ranah politik praktis. Walaupun sudah ada segelintir perempuan yang masuk dalam partai politik, namun terpilihnya perempuan sebagai wali kota dan wakil wali kota belum ada hingga saat ini.

Data KPU menyebutkan bahwa partisipasi pada pilkada tahun 2020 di Depok adalah 62,79 persen, dan menjadi angka partisipasi tertinggi selama Pilkada yang telah berlangsung sebelumnya. Namun, angka tersebut masih berada di bawah target tahun 2020 yang diharapkan KPU yakni 77,5 persen (Berita Depok, 2020). Selama dilaksanakan pilkada tahun 2005-2015, angka partisipasi tidak pernah melewati angka 60 persen (Maryam and Wahidin, 2021). Rendahnya partisipasi disebabkan kurangnya edukasi dan sosialisasi politik dari KPU, dan masih banyak masyarakat



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

yang menganggap pilkada tidak begitu penting karena selalu dikecewakan oleh pemerintah yang menjabat. Terlebih lagi pilkada tahun 2020 dilaksanakan saat pandemi Covid-19 sehingga menjadi tantangan yang cukup kompleks bagi penyelenggara pilkada. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Kota Depok pernah menjadi salah satu dari daerah yang masuk zona merah (Maryam and Wahidin, 2021). Hal inilah yang dapat berpengaruh pada kondisi pemilih saat ingin mengikuti pilkada tahun 2020 lalu. Selain itu, adapun cara untuk meningkatkan partisipasi politik pada warga Kota Depok adalah dengan mengencangkan pendidikan politik khususnya pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya saat pemilu.

Ketiga, beban ganda (*double burden*) didefinisikan sebagai beban kerja yang dimiliki lebih banyak dibandingkan gender lain. Beban ganda ini terjadi pada perempuan yang mempunyai dua peran sekaligus yakni peran publik dan domestik. Peran publik meliputi mencari nafkah, sementara peran domestik meliputi pekerjaan rumah seperti memasak, merapikan rumah, mengasuh anak, dan lainnya. Beban ganda adalah salah satu ketidakadilan gender. Karena beban ganda inilah yang menyebabkan budaya patriarki khususnya di Depok terus berlangsung. Seperti yang diajarkan pada agama Islam, perempuan harus bertanggung jawab pada peran domestik (Hidayati, 2015). Dengan adanya beban ganda tersebut, partisipasi perempuan di ranah politik menjadi rendah dan menyebabkan budaya patriarki di Kota Depok terus berlangsung. Karena beban ganda yang dimiliki perempuan, yang mana perempuan mempunyai tanggung jawab pada pekerjaan dan juga keluarga semakin memperkuat adanya segregasi pekerjaan.

Keempat, partai politik mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan aktivitas politik. Secara konstitusi menjelaskan bahwa partai politik berperan dalam pergerakan masyarakat untuk terlibat dalam politik. Adapun fungsinya yakni mewadahi sosialisasi, partisipasi, dan komunikasi politik bagi masyarakat (Surbakti,



2013). Selain itu, peran dari partai politik adalah menghasilkan kader-kader politik khususnya perempuan yang mumpuni. Selama lima kali penyelenggaraan pilkada di Kota Depok dari tahun 2005-2020, hanya ada satu perempuan yang mencalonkan sebagai Wakil Walikota Depok. Melihat fakta bahwa belum ada perempuan yang berhasil menjadi wali kota dan wakil wali kota di Depok menjadi tanda bahwa partai politik belum optimal dalam menyiapkan kader-kader perempuan dan mendukung secara penuh dalam pemilu di Kota Depok. Budaya patriarki yang kental di Kota Depok menjadi sebuah penghalang bagi partai politik dalam menyiapkan kader-kader perempuan. Dari minimnya dukungan terhadap perempuan inilah yang mengakibatkan kader-kader perempuan menjadi kesulitan dalam berkembang dan berkompetisi di pemilu. Selain itu, partai politik juga perlu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada perempuan agar tercipta kader-kader perempuan yang berkualitas dan lebih percaya diri untuk maju dalam pilkada.

Peran Pendidikan dalam Menghapus Budaya Patriarki dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Inklusif

Pendidikan merupakan kunci perwujudan keadilan gender dalam masyarakat patriarkis (Susanto, 2015). Pendidikan sendiri adalah aspek kunci untuk mentransfer berbagai macam norma, pengetahuan, serta kemampuan mereka dalam upaya perwujudan keadilan gender dalam segala aspek. Pendidikan akan memberikan dampak pada peningkatan peran perempuan dalam lingkup pekerjaan, ranah politik, serta pengambilan keputusan. Selain itu, peningkatan partisipasi politik perempuan harus diiringi juga oleh peningkatan akses informasi, dan keterlibatan mereka dalam kelompok pemerjuang hak perempuan. Hal tersebut sesuai dengan teori *empowerment* yang menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan terhadap akses dan kontrol penuh atas kehidupan mereka dalam segala aspek merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka. Dalam hal partisipasi politik,



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

peningkatan partisipasi politik perempuan harus dimulai dari peningkatan taraf pendidikan, pembinaan dan pengkaderan yang berkualitas oleh partai politik, pembentukan komunitas-komunitas perempuan, dan penyelenggaraan Pilkada yang transparan. Selain itu, kebijakan kuota and *affirmative action* juga dapat memberikan kemudahan bagi perempuan dalam mencalonkan diri pada penyelenggaraan pilkada di kota masing-masing. Seluruh upaya ini perlu dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi politik perempuan, kolaborasi antar sektor juga menjadi hal penting untuk memastikan bahwa perempuan benar-benar didukung dan diberdayakan serta tidak ada hambatan baik dari sisi hukum, budaya, atau norma yang menghalangi. Kesetaraan kontekstual perlu diwujudkan dalam hal ini. Artinya, kesetaraan bukan berarti sama dalam berbagai konteks, melainkan kesetaraan sesuai dengan konteks setiap individu. Pembagian kerja yang berimbang merupakan salah satu kunci untuk menciptakan hubungan yang baik dan harmonis (Arofah, 2019).

Partisipasi perempuan di Kota Depok, terutama pada pencalonan perempuan di ranah eksekutif dapat dikatakan cukup rendah. Selama lima kali penyelenggaraan pilkada di Kota Depok dari tahun 2005-2020, hanya ada satu perempuan yang mencalonkan sebagai Wakil Wali Kota Depok, yaitu Afifah Alia yang berpasangan dengan Pradi Supriatna yang pada pilkada 2020 mencalonkan sebagai Wali Kota Depok. Tentu hal tersebut menjadi bukti rendahnya partisipasi perempuan pada ranah eksekutif. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah budaya patriarki, stereotip gender, pendidikan rendah, terjadinya *double burden* atau beban ganda yang dipikul oleh perempuan, serta pengkaderan oleh partai politik yang belum cukup berhasil dalam menciptakan kader-kader perempuan yang mumpuni. Selain itu, masih tingginya stigma di kalangan masyarakat bahwa aktivitas politik merupakan aktivitas yang kotor dan hanya milik laki-laki. Stigma tersebut membuat kaum perempuan enggan berurusan dengan segala dunia perpolitikan, terlebih bergabung dengan partai politik. Padahal, politik merupakan sebuah ruang



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

untuk merumuskan berbagai macam kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyat, termasuk kehidupan perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya usaha dan kolaborasi bersama dari setiap sektor dalam meningkatkan kesadaran dan angka partisipasi perempuan dalam ranah politik.

Partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pilkada merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan angka partisipasi masyarakat serta memastikan sistem politik berjalan secara representatif, adil, dan demokratis. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kota Depok, dinyatakan bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu tahun 2024 mencapai angka 1.402.925 pemilih, dengan komposisi laki-laki sebanyak 690.261 dan perempuan sebanyak 712.654 (Berita Depok 2023). Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa pemilih perempuan memiliki angka yang cukup besar dibanding pemilih laki-laki. Maka dari itu, pilihan pemilih perempuan di Kota Depok sangat menentukan pemimpin kota tersebut selama lima tahun mendatang. Maka dari itu, perlu adanya pemberdayaan perempuan dalam konteks partisipasi politik agar mereka dapat menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pemimpin mereka selanjutnya.

Capaian keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Kota Depok telah memenuhi angka keterwakilan perempuan, yaitu 38% dengan jumlah anggota DPRD perempuan sebanyak 19 orang dan laki-laki sebanyak 31 orang (Badan Pusat Statistik Kota Depok 2019:17). Angka tersebut merupakan angka yang di dapat dari data BPS mengenai Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Menurut Fraksi/Partai dan Jenis Kelamin di Kota Depok 2014-2019. Berdasarkan data tersebut, PDIP memiliki persentase keterwakilan perempuan tertinggi dengan angka 54,5 persen disusul oleh PKS dan PPP (50%), Partai Golkar dan Demokrat (40%), Gerindra (33,3%), dan PAN (16,67%) (Badan Pusat Statistik Kota Depok 2019:21). Akan tetapi, terpenuhinya kuota perempuan di ranah legislatif belum menjadikan perempuan memiliki power lebih di ranah eksekutif, hal ini dapat terlihat dari minimnya calon



walikota/wakil walikota perempuan di Kota Depok.

Dilansir dari situs zakatsukses.org bahwa berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Kemendikbudristek) di tahun 2021, disebutkan bahwa angka putus sekolah justru lebih banyak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya Kota Depok (Zakat Sukses and Arif, 2022). Data tersebut menyatakan bahwa jumlah anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah di Kota Depok mencapai angka 15.453 anak. Berdasarkan data BPS Kota Depok tahun 2019 tentang Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia dari tahun 2010-2018 dijelaskan bahwa Kota Depok menempati peringkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan HLS Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia dengan angka 13,9 di tahun 2018, sementara itu Indonesia mendapat perolehan angka 12,91 dan Jawa Barat sebesar 12,45 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2019). Pemerintah Kota Depok memiliki peranan ekstra dalam upaya peningkatan angka partisipasi politik perempuan, upaya tersebut harus dilakukan dari tingkat paling dasar yaitu peningkatan akses pendidikan. Pemerintah Kota Depok harus berupaya dalam peningkatan kualitas guru dan program-program bantuan pendidikan kepada seluruh masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka perempuan akan semakin berdaulat atas kehidupannya. Hal tersebut akan mengurangi ketergantungan perempuan terhadap laki-laki yang juga beriringan terhadap menurunnya budaya patriarki di Kota Depok. Pendidikan politik juga harus diberikan terutama oleh lembaga pendidikan tinggi dan partai-partai politik. Hal ini bertujuan agar perempuan dapat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap dinamika politik yang terjadi. Selain itu, pendidikan politik juga berguna untuk mencegah eksploitasi politik perempuan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab hanya untuk mendapatkan suara.

Komunitas-komunitas perempuan juga harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat terutama pemerintah dalam upaya meningkatkan pemberdayaan



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

perempuan di berbagai sektor. Komunitas usaha, budaya, lingkungan, dan lain sebagainya merupakan bentuk bahwa perempuan dapat berperan dalam seluruh aspek kehidupan. Komunitas-komunitas ini juga menjadi sarana bagi perempuan untuk meningkatkan kapabilitas diri mereka sehingga mereka dapat dipandang dan didengar secara lebih luas oleh masyarakat dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan hak-hak mereka. Dari sisi kebijakan politik, kuota afirmatif bagi perempuan tetap harus dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk memastikan perempuan mendapatkan kemudahan akses dalam penyelenggaraan sistem Pemilu. Dukungan dari partai politik juga sangat berpengaruh untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemudahan akses perempuan untuk mendapatkan dukungan. Masyarakat juga harus berperan dalam gerakan perempuan pilih perempuan sebagai upaya dukungan pemberdayaan kaum perempuan dalam sistem politik. Saat ini komunitas-komunitas perempuan di Kota Depok telah berkembang, terdapat banyak komunitas perempuan di kota ini, diantaranya adalah *Depok Creative Women*, Komunitas Perempuan Mandiri, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA) dan lain sebagainya. Selain itu, komunitas-komunitas perempuan di Kota Depok juga didukung oleh Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Depok dengan aktif memberikan pelatihan dan penyuluhan terkait dengan peningkatan peran perempuan dalam masyarakat.

Pemerintah Kota Depok juga aktif dalam meningkatkan peran perempuan di masyarakat dengan mengadakan program “1000 Perempuan Pengusaha” di Kota Depok. Program ini merupakan pelatihan kewirausahaan bagi komunitas perempuan dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Depok untuk mengembangkan usahanya dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kota Depok. Hal ini merupakan upaya Pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan peran perempuan di masyarakat dan menghilangkan budaya patriarki yang masih ada di kota ini. Pendidikan merupakan kunci dalam mewujudkan keadilan gender,



oleh karena itu pemerintah Kota Depok wajib memberikan akses pendidikan dan pelatihan dalam segala bidang kepada kaum perempuan agar mereka terciptanya perempuan berdaya dan mandiri sehingga budaya patriarki dan stereotip gender tidak ada lagi di Kota Depok. Dengan hal tersebut maka perempuan dapat aktif berpartisipasi dalam segala bidang termasuk politik. Hal tersebut tentu berdampak positif bagi peningkatan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Depok serta mewujudkan keadilan gender yang inklusif di masyarakat.

Kesimpulan

Dari data KPU pada tahun 2005-2020 menunjukkan bahwa hanya satu perempuan yang maju sebagai Wakil Wali Kota Depok. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di ranah eksekutif masih sangat rendah. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:

1. Penyebab utama dari rendahnya partisipasi politik perempuan pada Pilkada di Kota Depok dari tahun 2005-2020 adalah adanya budaya patriarki yang kuat. Selain itu, Kota Depok juga dikuasai oleh PKS yang mempunyai simpatisan yang besar. Pengelolaan sistem politik yang dilakukan PKS di Depok merata hingga institusi pendidikan, bisnis, pemerintahan dan lingkup akar rumput yakni mengelola kelompok pengajian.
2. Terdapat faktor-faktor penyebab budaya patriarki masih ada pada pilkada di Kota Depok yaitu stereotip gender, rendahnya pendidikan politik, beban ganda (*double burden*), dan lemahnya dukungan partai politik terhadap perempuan pada Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk mengatasi menguatnya budaya patriarki pada pilkada di Kota Depok.
3. Adapun solusi yang bisa dilakukan adalah pentingnya meningkatkan pendidikan dalam menghapus budaya patriarki dan mewujudkan kesetaraan gender yang lebih inklusif. Selain itu solusi lain yang bisa dilakukan berupa



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

pembinaan dan pengkaderan yang berkualitas dari partai politik, pembentukan komunitas-komunitas perempuan, serta penyelenggaraan pilkada yang lebih transparan. Apabila solusi tersebut dijalankan dengan baik, maka partisipasi politik perempuan bisa meningkat dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berkontestasi pada Pemilu selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Amawi, Abla. (2007). *Against All Odds: Women Candidates in Jordan's 1997 Elections in From patriarchy to empowerment: women's participation, movement, and rights in the Middle East, North Africa, and South Asia*, edited by V. Moghadam. New York: Syracuse University Press.
- Arofah, Lumban. 2019. Wacana Kesetaraan Gender Studi pada Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* 1(1).
- Badan Pusat Statistik Kota Depok. (2019). *Kota Depok Dalam Angka*. Depok: BPS Kota Depok.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2019). *Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun, 2010-2018*. Retrieved (<https://jabar.bps.go.id/statictable/2019/04/21/588/-metode-baru-harapan-lama-sekolah-hls-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-barat-2010-2018.html>).
- Benstead, Lindsay J. (2021). Conceptualizing and Measuring Patriarchy: The Importance of Feminist Theory. *Mediterranean Politics* 26(2):234–46. doi: 10.1080/13629395.2020.1729627.
- Berita Depok. (2020). *Partisipasi Pemilih Di Pilkada Depok Alami Kenaikan 6,65 Persen*. Retrieved (<https://berita.depok.go.id/partisipasi-pemilih-di-pilkada-depok-alami-kenaikan-664-persen>).
- Berita Depok. (2023). *KPU Depok Tetapkan DPS Pemilu 2024 Sebanyak 1.402.915 Pemilih*. Retrieved (<https://berita.depok.go.id/kpu-depok-tetapkan-dps-pemilu-2024-sebanyak-1402915-pemilih>).
- Bressler, Charles. (2007). *Literary Criticism Writing: An Introduction to Theory and Practice*. 4th ed. New Jersey: Pearson-Prentice Hall.



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

- Budhiardjo, Miriam. (1982). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Damsar. (2017). *Pengantar Teori Sosiologi, Kencana*. Jakarta: Kencana.
- Faturochman. (2002). *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka dan Fakultas Psikologi UGM.
- Ferdinan, Wardhany Tsia, and VOI. (2020). Hampir 20 Tahun PKS Berkuasa di Depok, Charta. Retrieved April 30, 2023 (<https://voi.id/berita/22543/hampir-20-tahun-pks-berkuasa-di-depok-charta-politika-ungkap-analisisnya>).
- Hidayati, Nurul. (2015). "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 7(2):108–19.
- Kollo, Fredik Lambertus. (2017). "Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik Budaya Patriarki." *Repository Universitas Ahmad Dahlan* III(November):321–22.
- KPU Depok. (2020). *Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020*. Depok.
- KPU Depok. (2023). Hasil Pemilihan di Kota Depok Tahun 2005-2020. Retrieved (<https://kota-depok.kpu.go.id/page/read/46/hasil-pemilihan-di-kota-depok>).
- KPU Kota Depok. (2023). Hasil Pemilu di Kota Depok 2009-2019. Retrieved (<https://kota-depok.kpu.go.id/page/read/47/hasil-pemilu-di-kota-depok>).
- LSI. (2008). *Kajian Bulanan Edisi 2008*. 7.
- Marwah, Sofa, and Waluyo Handoko. (2008). Perempuan dan Pilkada Langsung. *YinYang* 3(1):67–80.
- Maryam, Siti, and Danis Tri Saputra Wahidin. (2021). Pendidikan Politik dan Bela Negara Bagi Pemilih Milenial di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok pada Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19. *Ikraith-Abdiimas* 4(2):105–13.
- Nantri, Putu. (2023). "Perempuan dan Politik." *Jurnal Studi Jender SRIKANDI* 3(1).
- Nussbaum, Martha. (2000). *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. 1st ed. New York: Cambridge University Press.
- Rahmawati, Nadya Anggiani, Ida Widianingsih, and Nina Karlina. (2023). Representasi Gender dalam Jabatan Struktural Pemerintah Kota Depok: Perspektif Glass Walls Theory. 14(2):625–30.
- Ridestian, Muhammad. (2020). Analisis Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Gubernur 2018 di Kelurahan Maleer, Kota Bandung. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

- Schlozman, Kay, and Henry Brady. (2022). Political Science and Political Participation. in *The Oxford Handbook of Political Institutions*, edited by S. A. Binder, R. A. W. Rhodes, and B. A. Rockman. New York: Oxford University Press.
- Surbakti, Ramlah. (2013). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Susanto, Nanang. (2015). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki. *Muwazah* 7(2):120–30.
- Young, Iris Marion. (2002). *Inclusion and Democracy*. Vol. I. New York: Oxford University PressOxford.
- Zakat Sukses, and Arif. (2022). Angka Putus Sekolah di Kota Depok.” Retrieved (<https://zakatsukses.org/angka-putus-sekolah-di-kota-depok/>).